

BPK-Pemkab/Kota MoU Akses Data Pengelolaan Keuangan

Pontianak, BERKAT.

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Barat dan Pemerintah 14 Kabupaten/Kota melakukan Memorandum of Understanding (Mou) terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem informasi akses data dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara di aula BPK RI perwakilan Kalbar, Kamis (16/6).

Menurut Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar Adi Sudibyo, nota kesepahaman

ini dibuat untuk menciptakan hubungan kerja sama pengembangan dan pengelolaan sistem informasi keuangan Negara.

"Bukan untuk mengatur kewenangan atau perizinan bagi BPK untuk mengakses data milik lembaga negara, kementerian atau badan," katanya.

Penandatanganan nota kesepahaman tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data pada Pemerintah Daerah ini dihadiri oleh bupati

BPK-Pemkab/Kota.....dari Hal 1

dan wali kota se- Kalbar, Gubernur Kalbar Drs. Cornelis, MH dan Muspida.

Gubernur Kalbar Cornelis menyambut baik langkah yang telah dilakukan oleh BPK dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem informasi akses data untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Ia berharap dengan telah dilakukannya nota kesepahaman ini maka tidak ada lagi ditemukan bupati/wali kota yang melakukan penyimpangan dalam mengolah keuangan Negara. "Tanpa adanya kontrol maka penggunaan uang negara akan menjadi tidak tepat sasaran sehingga diperlukan lembaga kontrol negara seperti yang dilakukan oleh BPK," katanya.

Dikatakannya, lewat kesepakatan, aturan-aturan main dalam pengelolaan keuangan daerah bisa ditaati dan ke depan tidak ada lagi penilaian penggunaan keuangan negara menjadi temuan sehingga dinilai tidak wajar oleh BPK.

Sementara itu, Ketua BPK RI Hadi Poernomo mengatakan, bagi pemerintah daerah Provinsi Kalbar dan kabupaten/

kota yang telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman itu, selanjutnya dibentuk pusat data BPK RI dengan menggabungkan data elektronik atau elektronik auditee (E-Auditee) melalui itu, BPK dapat melakukan perekaman, pengolahan, pemanfaatan dan pantauan yang bersumber dari berbagai pihak. Konsep tersebut disebut dengan BPK Sinergi sehingga monitoring keuangan negara akan semakin kuat.

"Dengan E-Auditee ini, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dapat lebih optimal sehingga hasil yang didapatkan untuk mendorong terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.

BPK RI telah menandatangani 939 nota kesepahaman, di antaranya dengan DPRD sebanyak 514, BPK luar negeri 13, lembaga negara 6, kementerian 34, non kementerian 40, BUMN 141 dan pemerintah daerah sebanyak 191 nota kesepahaman, termasuk 412 nota kesepahaman tentang pengembangan dan pengelolaan informasi untuk akses data. (nia)